

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di seluruh dunia, terdapat realitas yang dikenal sebagai kesenjangan ekonomi atau ketimpangan distribusi pendapatan antar negara maju dan negara berkembang. Hal tersebut harus dikaji oleh pemerintah dengan melakukan berbagai tindakan untuk memajukan pembangunan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui peningkatan distribusi pendapatan dari berbagai sumber.

Permasalahan utama yang sering dialami pemerintah Indonesia ialah ketimpangan pendapatan kelompok yang memiliki pendapatan tinggi dan rendah, yang berkontribusi terhadap kesenjangan ekonomi serta memperburuk keadaan kemiskinan (Tambunan, 2001). Ketimpangan pendapatan antar masyarakat Indonesia sangat mencolok. Ukuran paling umum untuk menilai perbedaan ekonomi masyarakat suatu wilayah adalah ukuran distribusi pendapatan individu. Hal ini menjadi semakin jelas seiring dengan meningkatnya jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan. Ketimpangan antarwilayah dapat memberikan dampak yang merugikan bagi masyarakat karena dapat menumbuhkan kecemburuan sosial, menjadikan suatu wilayah lebih rentan terhadap disintegrasi, dan menyebabkan kesenjangan ekonomi semakin melebar dan memburuk. Pandemi global virus corona tahun lalu mengakibatkan berkurangnya angkatan kerja dan banyaknya PHK, yang keduanya merupakan indikator kesenjangan. munculnya permukiman miskin di beberapa kota besar.

(Stephen & Todaro, 2011) mengatakan bahwa karakter pertumbuhan ekonomi termasuk caranya dicapai, siapa yang berpartisipasi, sektor mana yang diprioritaskan, dan sebagainya. Ini menentukan sejauh mana pertumbuhan ekonomi meningkatkan standar hidup orang miskin. Jika pertumbuhan ekonomi tidak mampu mengimbangi laju pembangunan, maka daerah yang terkena dampak akan mengalami stagnasi ekonomi. Faktor ini pada akhirnya akan menimbulkan ketimpangan pada suatu wilayah tertentu. Menurut (Sukirno, 2016) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan kegiatan ekonomi yang menghasilkan peningkatan jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat. Pertumbuhan ekonomi juga dapat didefinisikan sebagai perkembangan fiskal yang menghasilkan peningkatan produksi barang dan jasa yang relevan di suatu negara, seperti peningkatan jumlah barang yang diproduksi. Akibatnya, tingkat pertumbuhan pendapatan nasional riil yang dicapai adalah ukuran yang

digunakan untuk menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara (Sukirno, 2016).

Ketika Simon Kuznets mengemukakan hipotesis U terbalik, ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi mulai muncul. Menurut Kuznets, pada awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk tetapi kemudian semakin merata setelah mencapai titik tertentu. Dalam jangka pendek, terdapat ada korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan, sehingga pertumbuhan ekonomi akan diikuti oleh ketimpangan pendapatan (Stephen & Todaro, 2011).

Banyak aspek perekonomian yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kemajuan ekonomi suatu negara. Tingkat pengangguran merupakan salah satunya. Keadaan suatu negara dapat ditentukan dengan melihat tingkat penganggurannya, yang dapat mengetahui apakah perekonomiannya tumbuh dengan cepat, lambat, atau bahkan sedang mengalami masa-masa sulit. Selain itu, kita mungkin melihat ketimpangan atau kesenjangan dalam cara warga negara tersebut menerima uang melalui tingkat pengangguran. Pengangguran dapat terjadi ketika tingkat pengangguran tinggi tidak diimbangi dengan banyaknya kesempatan kerja dan sedikitnya penyerapan tenaga kerja. Hal ini disebabkan oleh lambatnya laju pertumbuhan lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang siap bekerja.

Pengangguran mencakup sebagian angkatan kerja, termasuk mereka yang sedang mencari pekerjaan, tidak mempunyai pekerjaan, sedang menyiapkan usaha, dan telah bekerja tetapi belum mulai bekerja lagi. Rendahnya pengetahuan manusia menjadi salah satu faktor yang meningkatkan tingginya tingkat pengangguran faktor lainnya adalah terbatasnya kesempatan mendapatkan pekerjaan. Saat ini, lapangan kerja yang tersedia untuk menampung angkatan kerja tidak sebanyak jumlah orang yang membutuhkan pekerjaan. Pengangguran adalah masalah serius yang jika tidak diatur maka dapat menghambat kesejahteraan sosial dan kekayaan nasional untuk mencapai potensi tertingginya. Indonesia tergolong beruntung namun juga berbahaya karena merupakan negara yang mengalami bonus demografi, yang berarti jumlah pekerja melebihi jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja. Pegawai yang tidak dapat ikut sertakan kehilangan pekerjaan dan tidak mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara. Kesenjangan pendapatan antara kelompok demografi berpendapatan tinggi dan rendah akan melebar akibat banyaknya pekerja yang tidak mampu berkontribusi. Pekerja pada awalnya dapat

memperoleh manfaat dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah namun ketika mereka kehilangan pekerjaan, hal ini akan menyebabkan peningkatan kesenjangan ekonomi.

Permasalahan pengangguran di Provinsi Jambi akan timbul karena meningkatnya angka pertumbuhan sumber daya manusia yang tidak sejalan dengan ketersediaan pekerjaan. Tingginya angka pengangguran suatu daerah menandakan bahwa pembangunannya telah gagal. Pengangguran selalu menjadi hambatan penting bagi kemampuan masyarakat untuk berkembang. Seseorang membutuhkan uang dari jerih payahnya untuk mencapai kesuksesan sehingga mereka dapat memaksimalkan pendapatannya. Kemakmuran masyarakat tentu akan terpuruk bila hal ini tidak tercapai. Hal ini menjelaskan bagaimana permasalahan pendapatan rendah, standar hidup yang tidak memadai, buruknya tingkat kesehatan, serta rendahnya tingkat pendidikan yang merupakan dampak langsung dari pengangguran karena tidak tersedianya cukup uang untuk memenuhi kebutuhan dasar berkaitan erat dengan dan berdampak pada kesenjangan pendapatan.

Meskipun hal ini sukses, kelompok lain masih menghadapi pengangguran terbuka. Misalnya saja, pengangguran terbuka pada kaum muda merupakan permasalahan yang terjadi di Provinsi Jambi. Keterlibatan kaum muda dalam pendidikan dan pelatihan adalah alasan relatif rendahnya rasio pekerjaan penduduk di kalangan kaum muda kecenderungan ini harus mendukung produktivitas dan daya saing angkatan kerja di masa depan.

Ketimpangan pendapatan dipengaruhi oleh indikator selanjutnya yang dikenal sebagai kemiskinan yang disebabkan oleh ketimpangan, atau dengan kata lain kemiskinan dan ketimpangan pendapatan tidak dapat dihindari satu sama lain. Menurut (Latumaerissa, 2015) Kemiskinan adalah ketika seseorang tidak dapat memperbaiki kondisi hidup mereka dan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kemiskinan juga dapat didefinisikan sebagai kekurangan barang dan pelayanan yang diperlukan untuk mencapai standar hidup yang layak. Contoh kemiskinan termasuk kekurangan makanan dan pakaian yang baik, tempat tinggal yang tidak memadai, ketidakmampuan untuk melanjutkan pendidikan, dan ketidakmampuan untuk mendapatkan perawatan medis dasar.

Luasnya wilayah Provinsi Jambi menyebabkan timbulnya beragamnya konteks sosial dan budaya, serta permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks. Selain itu, kemiskinan merupakan permasalahan yang memiliki banyak segi karena tidak hanya berdampak pada jumlah uang yang diperoleh namun juga kerentanan dan potensi menjadi miskin, terampasnya hak-hak

dasar, dan kesenjangan dalam cara individu dan kelompok diperlakukan ketika mencoba menjalani hidup yang berharga (Agussalim, 2009).

Salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional adalah pembangunan infrastruktur. Membangun infrastruktur yang baik dapat menjadi pilihan strategis untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat juga dapat menciptakan lapangan kerja baru (Iqbal et al., 2017). Dengan adanya fasilitas yang baik, tingkat kemiskinan dapat dikurangi dan pendapatan per kapita masyarakat dapat ditingkatkan.

Infrastruktur yang diperbarui dapat meningkatkan efisiensi, mempercepat arus barang dan jasa, mengurangi biaya, dan memudahkan masyarakat untuk melakukan kegiatan (Iqbal et al., 2017). Ketersediaan infrastruktur yang memadai juga dapat mendorong produktivitas suatu daerah.

Jika jalan raya yang baik tersedia, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi diharapkan lebih baik, yang akan mengurangi ketimpangan pembangunan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Produksi pertanian dan perkebunan dapat ditemukan di berbagai desa di provinsi Jambi. Selain itu, karena kekurangan infrastruktur listrik, hasil usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) belum tersentuh oleh teknologi. Kekurangan infrastruktur ini menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah. Ekonomi lokal sangat bergantung pada daerah produksi.

Provinsi Jambi terdiri dari 9 Kabupaten dan 2 Kota. Rata-rata ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Jambi mengalami penurunan. Ketimpangan pendapatan di Provinsi Jambi tahun 2018 sebesar 0,33 poin, tahun 2019 sebesar 0,32 poin, tahun 2020 sebesar 0,32 poin, tahun 2021 sebesar 0,31 poin dan tahun 2022 sebesar 0,31 poin. Pada tahun 2022 terdapat 3 kabupaten/kota yang memiliki nilai ketimpangan pendapatan tertinggi yaitu Kota Jambi sebesar 0,36 poin, Kabupaten Merangin sebesar 0,35 poin, dan Kabupaten Bungo sebesar 0,32 poin. Dan juga terdapat 3 kabupaten/kota yang memiliki angka ketimpangan pendapatan terendah yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 0,26 poin, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Muaro Jambi sebesar 0,27 poin, dan Kabupaten Kerinci sebesar 0,28 poin.

Salah satu variabel yang berperan dalam ketimpangan pendapatan adalah pertumbuhan ekonomi. Rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi jambi mengalami fluktuasi. Penurunan pertumbuhan ekonomi terjadi pada tahun 2020, hal ini disebabkan oleh pandemic covid-19 yang melanda seluruh dunia dan pada tahun 2022 mulai membaiknya

keadaan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi jambi tahun 2018 sebesar 4,69%, tahun 2019 sebesar 4,35%, tahun 2020 sebesar -0,51%, tahun 2021 sebesar 3,69%, dan tahun 2022 sebesar 5,13%. Pada tahun 2022 terdapat 3 kabupaten/kota yang memiliki angka pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu Kabupaten Batanghari sebesar 12,27%, Kabupaten Muaro Jambi sebesar 7,97%, dan Kabupaten Sarolangun sebesar 6,73%. Dan juga terdapat 3 kabupaten/kota yang memiliki angka pertumbuhan ekonomi terendah yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 0,57%, Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 2,56%, dan Kabupaten Kerinci sebesar 4,43%.

Selanjutnya variabel yang berperan dalam ketimpangan pendapatan adalah tingkat pengangguran. Rata-rata tingkat pengangguran kabupaten/kota di provinsi jambi mengalami fluktuasi. Tingkat pengangguran di Provinsi jambi tahun 2018 sebesar 3,86%, tahun 2019 sebesar 4,06%, tahun 2020 sebesar 5,13%, tahun 2021 sebesar 5,09%, dan tahun 2022 sebesar 4,59%. Pada tahun 2022 terdapat 3 kabupaten/kota yang memiliki angka tingkat pengangguran tertinggi yaitu Kota Jambi sebesar 8,95%, Kabupaten Bungo sebesar 5,50%, dan Kabupaten Muaro Jambi sebesar 5,35%. Dan juga terdapat 3 kabupaten/kota yang memiliki angka tingkat pengangguran terendah yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 1,32%, Kabupaten Tebo sebesar 1,80%, dan Kota Sungai Penuh sebesar 2,49%.

Selanjutnya variabel yang berperan dalam ketimpangan pendapatan adalah tingkat kemiskinan. Rata-rata tingkat kemiskinan kabupaten/kota di provinsi jambi mengalami fluktuasi. Tingkat kemiskinan di Provinsi jambi tahun 2018 sebesar 7,92%, tahun 2019 sebesar 7,60%, tahun 2020 sebesar 7,58%, tahun 2021 sebesar 8,09%, dan tahun 2022 sebesar 7,62%. Pada tahun 2022 terdapat 3 kabupaten/kota yang memiliki angka tingkat kemiskinan tertinggi yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 10,91%, Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 10,00%, dan Kabupaten Batanghari sebesar 9,63%. Dan juga terdapat 3 kabupaten/kota yang memiliki angka tingkat kemiskinan terendah yaitu Kota Sungai Penuh sebesar 2,97%, Kabupaten Muaro Jambi sebesar 4,47%, dan Kabupaten Bungo sebesar 5,38%.

Selanjutnya variabel yang berperan dalam ketimpangan pendapatan adalah infrastruktur. Rata-rata infrastruktur kabupaten/kota di provinsi jambi mengalami fluktuasi. Pada tahun 2022 terdapat 3 kabupaten/kota yang memiliki angka infrastruktur tertinggi yaitu Kabupaten Merangin sebesar 97,06 Km, Kabupaten Kabupaten Tabo sebesar 86,90 Km, dan Kabupaten Muaro Jambi sebesar 50,60 Km. Dan juga terdapat 3 kabupaten/kota yang memiliki angka infrastruktur

terendah yaitu Kota Sungai Penuh sebesar 8,05 Km, Kabupaten Batanghari sebesar 26,35 Km, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 27,60 Km.

Dari latar belakang masalah, penelitian ini bermaksud guna menganalisis ketimpangan pendapatan masyarakat yang ada di Provinsi Jambi melalui variabel Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran, Tingkat Kemiskinan, dan Infrastruktur pada tahun 2015-2022. Maka penulis tertarik mengambil judul "**Determinan Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar yang telah dijelaskan, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kondisi pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, infrastruktur, dan ketimpangan pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2015-2022?
2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan infrastruktur terhadap ketimpangan pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2015-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kondisi pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, infrastruktur, dan ketimpangan pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2015-2022
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan infrastruktur terhadap ketimpangan pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2015-2022

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan temuan dan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, berikut manfaat penelitian ini:

1. Bagi Akademisi

Akademisi yang membaca dan memahami temuan Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan kesadaran. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat

menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang meneliti variabel-variabel yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan.

2. Bagi Praktis

Hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi pihak-pihak yang menyusun strategi, baik instansi pemerintah maupun organisasi swasta, dalam menentukan kebijakan atau tindakan yang tepat untuk mengatasi ketimpangan pendapatan.